



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id - www.ppid.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3338/UN21/TI/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Universitas Jambi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Universitas Jambi Nomor 28/UN21/TI.00/2024 tanggal 30 September 2024 hal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan pada Universitas Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal .

REKTOR,

08 OCT 2024



HELMI

NIP 197106061998031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR ~~3338~~/UN21/TI/2024

TANGGAL : 08 OCT 2024

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
1.	Biodata Mahasiswa	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan		Dapat mengungkap data pribadi	Sesuai Retensi Arsip
2.	Data nilai mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 3 huruf h angka 4 Permenristekdikti No 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
3.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	1. Pasal 17 huruf b dan i UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 3 huruf h angka 4 Permenristekdikti No 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
4.	Proposal penelitian mahasiswa	1. Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 3 huruf h angka 4 Permenristekdikti No 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
5.	Daftar riwayat <i>studi</i> mahasiswa	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sesuai Retensi Arsip
6.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
7.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi		Sesuai Retensi Arsip
8.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan i, UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 3 huruf h angka 4 Permenristekdikti No 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
9.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 3. Pasal 8 ayat 3 huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun 2016 tentang layanan informasi 	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
10.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan presiden No.4 tahun 2015	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
11.	Hasil <i>detail engineering Desain</i> (DED) dari konsultan perencanaan	Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan presiden No.4 tahun 2015	Dapat mengungkap data pribadi		

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
12.	Dokumen penawaran	Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan presiden No.4 tahun 2015		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
13.	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf b dan h angka 5, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
14.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
15.	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sesuai Retensi Arsip
16.	Data penilaian hasil <i>rekrutmen</i> dan seleksi	Pasal 17 huruf h, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sesuai Retensi Arsip
17.	Data gaji dan tunjangan, <i>remunerasi</i> dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
18.	Dokumen usulan <i>promosi, mutasi, dan rotasi</i> pegawai	Pasal 17 huruf i, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
19.	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i, UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 3 huruf h angka 4 Permenristekdikti No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
20.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil	Pasal 17 huruf h, UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sesuai Retensi Arsip
21.	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 44 ayat (1), UU No.14 Tahun 2018 tentang Kearsipan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru
22.	Data pribadi mitra kerjasama	Pasal 17 huruf h, UU No.14 Tahun 2018 tentang Kearsipan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
23.	Proposal penelitian	1. Pasal 17 huruf b, UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
24.	Nilai proposal	Pasal 17 huruf b, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
25.	Nilai monitoring evaluasi	Pasal 17 huruf b, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip

No.	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
26.	Nilai seminar hasil	Pasal 17 huruf b, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sesuai Retensi Arsip
27.	Konfigurasi data <i>center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan aplikasi, <i>username</i> dan <i>password</i> akun	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pasal 16 ayat 1 butir b; 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pasal 17 huruf b; 3. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h 	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai Diterbitkannya Peraturan yang Baru

Ditetapkan di Jambi

REKTOR

08 OCT 2024



HELMI

NIP 197106061998031001 f d